



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: <http://dprd.malangkab.go.id>
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 800.1.11.1/ 6 /KEP/35.07.100/2026

TENTANG

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Tembusan
Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor : 800.1.11.1/ **6** /KEP/35.07.100/2026
 Tentang : Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

**PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	NAMA/NIP/NIPPPK/PANGKAT/GOL		TUGAS
1.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : : Neni Rahmawati, S.E. 199207262025212013 IX	Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di operator e-BMD dan SiapAksi
2.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : : Reza Septian Nugraha, S.A.P. 199109242023211022 IX	Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di Kertas Kerja Persediaan (KKP) Bagian Umum
3.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : : Ahmad Burhanudin 198307192010011004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di Kertas Kerja Persediaan (KKP) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : : Muhammad Agam Alfalah Efendi 200106062025211005 V	Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di Kertas Kerja Persediaan (KKP) Bagian Program Keuangan

5.	Nama	: Dodik Prabowo, S.H.	Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di Kertas Kerja Persediaan (KKP) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	NIPPPK	: 198708312023211019	
	Pangkat/Gol	: IX	

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI